

Ikan Layang Terbang Menjulung:

Suatu Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Maritim

Oleh:

Sutejo K. Widodo

**Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal,
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata,**

Makasar tgl. 26-29 Mei 2009

**Ikan Layang Terbang Menjulung:
Suatu Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Maritim(
Oleh: Sutejo K. Widodo((**

..... bukan hanya telah memperkaya khasanah kepustakaan mengenai sejarah maritim dengan fokus sejarah perikanan, tetapi juga karena studi kasus tentang Pelabuhan Pekalongan yang dilakukan penulis, berhasil mengungkap aspek-aspek baru tentang sejarah lokal kawasan yang bersangkutan.
Prof. Dr. A.B. Lopian.

A. Pengantar Penjelasan terhadap Judul.

Ulasan karya yang dibahas pada kesempatan ini adalah disertasi penulis yang diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata Tiga di Universitas Indonesia tahun 2002, dengan judul Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990. Judul dengan dominasi akademik, "perkembangan" mempunyai kedekatan dengan pengertian "pertumbuhan, pasang-surat, dan dinamika". Adapun penggunaan tambahan judul pada buku yang diterbitkan menjadi Ikan Layang Terbang Menjulung di bagian depan, terilhami oleh beberapa hal dan dengan maksud untuk mudah diingat, syukur menarik. Pertama, sebagian besar ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Pekalongan adalah ikan layang (*caranykurra*), dari tahun ke tahun ikan layang mendominasi tangkapan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ikan layang menjadi faktor utama dari perkembangan pelabuhan Pekalongan. Kecuali ada ikan yang bernama ikan layang, ada pula ikan terbang, namun yang dimaksudkan disini adalah meningkatnya hasil tangkapan yang didaratkan berupa ikan layang yang terus meningkat dengan peningkatan yang drastis meningkat naik bagaikan terbang menjulang, seperti gambar tayangan ikan TV Indosiar. Penamaan ini juga sejalan dengan ungkapan perumpamaan yang digunakan

untuk menggambarkan masyarakat Pekalongan, yaitu ”*merak ngigel sesonderan*” (burung merak yang asyik menari-nari), sebagai suatu gambaran masyarakat yang senang mempertontonkan kecantikan, keindahan, kekayaan, harta bendanya kepada orang lain sebagai bukti keberhasilan dalam usaha. Ini sesuai dengan sifat pedagang dalam mengekspresikan sebagai bagian dari kesuksesan dalam usahanya.

B. Perjalanan Pilihan terhadap Pelabuhan Perikanan Pekalongan:

Sesuai kondisi obyektif wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan juga letak Universitas Diponegoro Semarang yang berada di kota pantai, maka Universitas Diponegoro dalam rencana pengembangannya menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) pada *coastal eco-development*. Untuk itu tiap Fakultas dan Program Studi sebagai ujung tombak dalam pengembangan ilmu berusaha seoptimal mungkin menterjemahkannya dengan mendasarkan pada PIP tersebut. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro awal tahun 1990-an mulai menyertakan beberapa pengajar untuk mengambil bidang kajian maritim, dan sejak tahun 1997 secara khusus memfokuskan kepada pengembangan sejarah maritim, ditandai dengan program penelitian dan studi lanjut program strata tiga.

Penulis sebagai salah satu anggota warga Jurusan Sejarah Undip, mengambil bagian dari sejarah maritim tersebut, dengan kekhususan pada sektor perikanan, kenelayanan, utamanya pada pelabuhan perikanan. Kesempatan mendalami masalah tersebut diperoleh pada waktu terlibat dalam Proyek ”Penelitian Pendidikan” berjudul *Java Sea Region in Transition, 1870-1970*. Penelitian dengan dukungan dana dari Penelitian Hibah Bersaing dari Dikti dan The Toyota Foundation yang terbagi ke dalam tiga tahap, Tahun I untuk periode 1870-1900, Tahun II untuk periode 1900-1940, dan Tahun III untuk periode 1940-1970. Untuk penelitian terhadap sektor perikanan dimulai dengan mengadakan ”peninjauan perbandingan” di enam pusat perikanan di pantai utara Jawa yakni dengan mengadakan komparasi kegiatan perikanan antara yang terdapat pada laporan dari *Onderzoek naar de Mindere Welvaartcommissie* (1905) dengan keadaan yang berlangsung sekitar tahun 1990-an. Enam Lokasi yang dipilih, terdiri dari dua pusat perikanan di masing-masing propinsi, dua berada di Jawa Barat yaitu pusat pendaratan ikan di Sungai Buntu Kecamatan Pedes (Rengasdengklok) Kabupaten Kerawang, dan Gebang Mekar Kecamatan Babagan (Losari) Kabupaten Cirebon; dua dari Jawa Tengah, yakni pusat pendaratan ikan di Pekalongan (boom) dan di Jobokuto Kabupaten Jepara; dua dari Jawa Timur yaitu pusat pendaratan ikan di Bancar Kabupaten Tuban, dan Sumenep di Madura. Dari penelitian tersebut, untuk tahun kedua ditetapkan dua pusat pendaratan ikan yaitu Sumenep dan Pekalongan karena di kedua tempat terdapat perkembangan yang spesifik. Kegiatan perikanan di Sumenep tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Pada musim Barat nelayan di pantai utara Madura melakukan *andon* ke Selat Madura. Sementara itu di pelabuhan Pekalongan merupakan pendaratan ikan yang semula kecil, namun dalam perkembangannya mampu menempati peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Atas dasar hasil penelitian tersebut, pada tahun ke tiga fokus penelitian dipilih Pelabuhan Perikanan Pekalongan. Untuk memberikan gambaran suatu proses sampai pada pilihan terhadap fokus masalah pelabuhan perikanan, daftar berikut ini, merupakan serangkaian bahan, dan hasil-hasil yang memberikan penguatan terhadap pemilihan bagian dari topik penelitian sejarah lokal maritim kenelayanan di Pekalongan.

Daftar Karya Penulisan Terkait dengan Topik

No	Judul Karya	Tahun	Media
1.	Teknologi dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan	1994	Artikel dimuat dalam Majalah Penelitian

	Ujungbatu - Jepara		Undip. (Ringkasan Tesis, 1994).
2.	Teknologi dan Disparitas Sosial Masyarakat Nelayan	1994	Makalah
3.	Nelayan dan Lingkungannya	1995	Artikel dimuat dalam Majalah Ilmu Sastra
4.	Sejarah Ekonomi Nelayan di Jawa: Statu Konsep Awal	1995	Makalah
5.	Kajian Awal Terhadap Perkembangan Perikanan Laut Bagansiapi-api Tahun 1940-1990: Suatu Studi Perkembangan Center-Pheriphery	1996	Makalah
6.	Etos Kerja, Semangat Kerja, dan Bagi Hasil Nelayan di Jepara	1996	Penelitian Dosen Muda
7.	Identifikasi Terhadap Konflik Terbuka Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang: Kasus di Desa Pasarbanggi	1997	Artikel dimuat di Jurnal Citralekha
8.	The Direction of Fishery Sector Development and The Emerge of Pekalongan Fishery Harbour in 1940-1980.	1999	Makalah pada The First International Conference on Indonesia Maritime History, 1999. di Semarang
9.	Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Kecil Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara, 1900-1990.	1999-2000	Laporan Penelitian Penelitian Undip-McMaster Canada
10.	The Direction of Fishery Development in Indonesia and Some Notes of Functional Change of Pekalongan Harbour from Public to Fishery Harbour, 1940-1980.	2000	Artikel dimuat dalam Journal of Coastal Development, Vol. 4.
11.	Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Perikanan, 1900-1990	2000-2001	Laporan PenelitianThe Toyota Foundation desk YIIS
12.	Pekalongan Harbor: The Change from Trade to Fishery Harbor, during 1940-1990.	2001	Makalah pada 15th International Workshop on Southeast Asia Studies: Ports, Ships and Resources: Maritime History of Indonesia in the Age Transition, 1870 until Present, di Leiden.
13.	Impor Ikan di Jawa, 1900-1940: Suatu Ironi dari Sumber Kekayaan Laut	2001	Artikel dimuat dalam Arung Samudera : Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian
14.	The Change of Pekalongan Harbor: From Trade to A Fishing Harbor, 1900-1990.	2002	Artikel dimuat dalam Majalah Kajian Sastra
15.	Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990	28-12-2002	Disertasi dipertahankan di Universitas Indonesia
16.	Pengembangan Pelabuhan Pekalongan	2003	Makalah dalam Diskusi

			Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah, oleh Asdep Sejarah Nasional.
17.	Ikan Layang Terbang Menjulung: Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900 - 1990	2005	Buku terbit atas pendanaan dari The Toyota Foundation
18.	Interrelasi Peran Kelompok Kepentingan pada Masyarakat Nelayan Muncar di Ujung Timur Pulau Jawa	2004	Artikel dimuat dalam Jurnal Citralekha (Penelitian th 1994)
19.	Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Politik	2006	Makalah pada Semiloka Nasional Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia
20.	Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan	2006	Makalah pada Konferensi Nasional Sejarah ke VIII
21.	Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa, 1900 - 2000	2007	Pidato Pengukuhan, 17 Maret.

C. Permasalahan Usaha Perikanan dan Perubahan Preferensi kepada Ikan Segar.

Kecenderungan global dari faktor eksternal yang memunculkan arti penting pelabuhan perikanan di kawasan pantai utara Jawa dapat dilihat kembali dengan memberikan tinjauan secara ringkas mulai dari kegiatan *Onderzoek naar de Mindere Welvaartcommissie* yang dibentuk dengan tugas untuk menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemunduran kesejahteraan yang terjadi pada akhir abad ke-19. Secara khusus dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Komisi berpendapat bahwa pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan merupakan masalah penting. Untuk itu supaya dilakukan perbaikan terhadap pelabuhan-pelabuhan perikanan, melakukan pengerukan muara sungai dan membangun tempat pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan dengan tingkat kedalaman yang tetap terjaga memungkinkan kegiatan pendaratan ikan dapat berlangsung sepanjang tahun. Dalam skala yang lebih luas, kondisi pelabuhan perikanan, muara sungai, dan tempat pendaratan ikan merupakan bagian penting dalam rantai peroses yang menghubungkan antara nelayan sebagai produsen dengan pedagang untuk sampai pada konsumen. Serangkaian kegiatan nelayan memerlukan persyaratan dan kelengkapan mulai dari pengadaan perahu, alat tangkap, perbekalan dan sebagainya; muaranya pada hasil tangkapan yang kemudian memasuki wilayah pelelangan di pelabuhan perikanan. Rangkaian kegiatan selanjutnya diteruskan oleh pedagang atau *bakul* ikan yang melakukan lelang untuk kemudian melanjutkannya ke dalam rantai proses pengolahan/pengawetan, pengangkutan dengan segala perlengkapan pendukungnya untuk kemudian sampai pada ujung proses perdagangan yakni konsumen. Keterkaitan antara produsen dengan konsumen mempengaruhi terhadap perkembangan suatu tempat sebagai pelabuhan perikanan. Sebagaimana perubahan orientasi permintaan konsumen terhadap jenis hasil tangkapan dengan kondisi tertentu, merupakan dorongan kekuatan besar berubahnya sendi-sendi dasar dalam masyarakat nelayan secara luas dan menyeluruh.

Kemudian, berdasarkan pada aspek penggunaan teknologi distribusi, sampai dengan akhir tahun 1960-an pemasaran ikan didasarkan pada garam yang berakibat pada masalah penampungan. Dampaknya, nelayan tidak melihat manfaat yang cukup besar dari kurang

sempurnanya penampungan di daerah surplus, sehingga produksi ikan yang lebih besar dari kapasitas penampungan setempat menyebabkan harga ikan menurun. Akibat yang lebih tragis, kelebihan produksi tangkapan sering harus dibuang.

Demikian pula, ikan sebagai bahan pangan mempunyai sifat yang mudah busuk, hal ini sering dimanfaatkan oleh pedagang untuk mempermainkan dan menekan harga. Prakteknya, harga ikan di daerah produksi ditekan serendah-rendahnya, sementara harga sampai pada konsumen tetap tinggi. Dengan demikian, terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara harga di daerah produksi, dengan harga pada konsumen. Dalam kondisi seperti ini nelayan tidak memperoleh harga yang wajar atas jerih payahnya. Kondisi yang seperti itu menyebabkan kegairahan berproduksi terutama di luar pulau Jawa sukar ditimbulkan karena nelayan tidak merasa terjamin, bahwa hasil tangkapannya mendapat pasaran yang wajar.

Secara umum sebelum tahun 1970-an cara pengolahan dan pengawetan ikan di daerah surplus masih dilakukan dengan cara sederhana sehingga ikan hasil tangkapan tidak bisa tahan lama. Padahal pengolahan merupakan penampungan utama yang mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produksi. Sementara itu, pengolahan dan pengawetan dalam kaleng menghadapi persoalan teknis dan kurang ekonomis. Demikian pula daerah produsen garam juga tidak merata di semua kawasan, dan untuk distribusi memerlukan pengangkutan kapal antar pulau dan kawasan ke pelbagai daerah penghasil ikan. Belum lagi, kesulitan suplai garam, karena sering kapal selain kapal PN Garam, enggan untuk mengangkut dengan alasan air garam merusak kapal. Dengan demikian, kesulitan pengiriman garam menyebabkan kekurangan garam untuk pengolahan di suatu kawasan, mengakibatkan banyak produksi ikan tidak dapat diawetkan, dan dengan sendirinya mengurangi kegairahan dan keinginan untuk menaikkan produksi. Untuk itu, kebutuhan ketersediaan garam menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Garam harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat di daerah-daerah produksi perikanan. Kekurangan persediaan garam mengakibatkan kerugian seperti: harga garam tidak stabil, pengolahan ikan tidak bisa dilakukan, kualitas ikan olahan menurun, harga ikan basah yang tidak dapat diolah akan turun, biaya produksi bertambah, dan produksi akan berkurang.

Kondisi yang demikian itu menjadikan faktor pendorong produksi ikan akan mengalir dan berpindah ke daerah yang cepat menyerap produksi tangkapan, yakni di kawasan yang padat penduduk. Menurut catatan bahwa sebagian besar konsumen ikan asin tinggal di Jawa Barat, dimana perdagangan ikan asin dari luar Jawa hampir keseluruhannya dikuasi oleh perkumpulan dagang yang tergabung dalam *Ek Hoo Goan*. Kejayaan *Ek Hoo Goan* yang telah berlangsung lama tersebut, bertentangan dengan prinsip "Berdikari" yang diterapkan sesuai dengan Ketetapan MPRS No. VI/1965. Bahwa sistem distribusi yang bersifat kapitalis tersebut dinasionalisasi dan disosialisasi melewati sistem distribusi koperasi yang harus mengabdikan kepada produksi dan harus bisa menimbulkan tambahan keuntungan kepada nelayan-produsen.

Sejalan dengan program pembangunan pemerintah Indonesia melalui tahapan Pembangunan Lima Tahun, pendapatan perkapita masyarakat mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu sejak tahun 1969 sampai 1989, tingkat hidup rata-rata diukur dengan produk domestik bruto perkapita secara riil telah meningkat dari \$ 220 US menjadi \$ 580 US. Peningkatan pendapatan tersebut secara distributif lebih besar terjadi di perkotaan, telah mendorong adanya tuntutan perubahan permintaan terhadap jenis ikan bergeser dari ikan asin kepada ikan basah atau ikan segar. Perubahan permintaan kepada ikan segar menuntut adanya penyesuaian dan perubahan-perubahan dalam bidang teknologi distribusi dari yang semula berbasis pada teknologi pengolahan dengan bahan utama garam, ke teknologi distribusi yang menggunakan bahan utama dengan sistem pendinginan berupa kamar pendingin, *cold storage*, dan

es. Dalam praktek, pendingan berupa es balok merupakan sistim yang paling praktis, mudah dibawa ke berbagai keadaan, mulai dari pengawetan ikan di palka kapal, dan disertakan dalam tempat penyimpanan untuk angkutan sampai kepada konsumen. Perubahan sistim teknologi distribusi yang mendasarkan kepada garam bergeser ke sistem teknologi distribusi yang mendasarkan pada es mempunyai efek perubahan yang amat luas. Namun demikian, secara sosial proses perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan struktur masyarakat yang melingkupinya. Bahwa, kesempatan menggapai peluang perubahan terkait dengan kemampuan dalam kepenguasaan tidak dapat terlepas dengan struktur kepenguasaan sebelumnya. Kelompok atau jaringan penguasaan dan orang-orang yang menguasai teknologi distribusi baik garam atau es, merupakan kelompok dominan sebelumnya yang akan tetap menentukan terhadap kepengusaannya terhadap distribusi ikan.

Secara bersamaan faktor yang turut menjadi pendorong dari perkembangan Pelabuhan Perikanan Pekalongan yakni bersamaan dengan diterapkannya penghentian impor ikan, perubahan pendekatan pemasaran yang ditujukan bagi tersedianya ikan basah di Jawa, perubahan preferensi dan daya beli masyarakat yang didukung oleh teknologi distribusi, serta adanya faktor internal adanya kemampuan lokal dalam menangkap peluang dari perubahan-perubahan tersebut.

D. Faktor Spesifik Internal Penopang Perkembangan Pelabuhan Perikanan Pekalongan.

1. Wilayah Geografis dan Lingkungan Alam.

Menurut kitab Poerwo Lelana, statu kitab berhuruf Jawa, “Pekalongan” merupakan turunan dari kata *along*, suatu kata yang terkait dengan dunia kenelayanan; yang artinya memperoleh hasil tangkapan dari pekerjaannya menangkap ikan di laut. *Along* dalam bahasa *Jawa kromo*, suatu tataran tertinggi dalam bahasa Jawa, mempunyai pengertian *pengangsalan* yang hampir sama dengan hasil yang didapat atau perolehan. Sampai sekarang, *along* merupakan sebutan umum yang digunakan untuk menamakan hasil penangkapan dalam jumlah besar atau banyak oleh masyarakat di kawasan pantai utara Jawa bagian tengah, seperti di Demak, Jepara, Rembang sampai dengan Tuban.

Adapun Pekalongan dalam arti kewilayahan mencakup empat pengertian. Pertama sebagai keresidenan (*residensi*) terletak di pantai utara Jawa, merupakan salah satu pusat pendaratan ikan yang keberadaannya sudah berlangsung lama. Disamping itu, sebutan “Pekalongan” juga menunjuk pada arti wilayah kabupaten (*afdeeling, regensi*), kawedanan (*district*), dan kotamadya atau pemerintah kota (*gemeente: municipality*).

Kawasan laut sekitar Pelabuhan Pekalongan ke sebelah timur sampai laut sekitar kepulauan Karimunjawa sudah lama dikenal sebagai kawasan kaya ikan. Beberapa pelabuhan pendaratan ikan yang berada di kawasan Jawa bagian tengah terdapat di Eretan, Indramayu, Gebang, Sawojajar, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, Kendal, Semarang, Moro, dan Jepara.

2. Mewarisi Sarana Peninggalan Pelabuhan Umum.

Pelabuhan Pekalongan mulai dibangun pada tahun 1853, dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 31 Mei 1859 sebagai pelabuhan umum untuk kepentingan ekspor-impor. Pelabuhan terletak di muara *Kali Pekalongan* atau Sungai Pekalongan. Perahu-perahu kecil dapat memanfaatkan alur sungai untuk berlayar sampai lebih satu kilometer ke arah daratan, mendekati bangunan-bangunan utama kota yang berada di jalan utama. Muara Sungai Pekalongan juga merupakan muara dari Sungai Banger, Sungai Akana dan Sungai Sebulan. Sebagian besar

kawasan pelabuhan sampai dengan awal abad 20 masih berupa rawa-rawa, yaitu Rawa Pucung di sebelah kiri dan Rawa Sebulan di sebelah kanan. Diantara sungai-sungai tersebut, Sungai Pekalongan merupakan sungai yang paling besar, dengan hulu sungai di Pegunungan Kendeng, mengalir melalui daerah pertanian di Pekalongan yang bermuara di Kotamadya Pekalongan. Arti penting Sungai Pekalongan bagi kegiatan masyarakat sekitar pelabuhan dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan di masa lalu, masih dapat dilacak hingga sekarang dengan bukti-bukti berupa beberapa bangunan penting berada di sepanjang sungai. Bangunan yang terletak di sepanjang sungai tersebut dikenal dengan sebutan *loji*, yaitu suatu kompleks bangunan permanen yang terbuat dari bahan batu atau batu kali dengan bentuk bangunan ala Eropa yang berbeda dengan bentuk bangunan yang didiami oleh pribumi. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh orang Cina, Arab dan Eropa berlangsung di kawasan ini, dengan bangunan yang masih tersisa berupa gudang dan gedung lembaga kemasyarakatan.

Pelabuhan Pekalongan dilengkapi dengan sarana pelabuhan berupa menara *suar*, *pier* penahan gelombang, gedung kantor, dan bangunan gudang. Bangunan menara sebagai petunjuk posisi dari pelabuhan bagi kapal-kapal yang akan memasuki pelabuhan khususnya pada malam hari. Kemudian *pier* penahan gelombang di kanan dan kiri muara sungai dimaksudkan agar batas-batas tepian sungai tidak terkena erosi ketika ada gelombang pasang-surut dari laut, dan juga arus gelombang akibat gerak kapal. Bangunan gedung kantor sebagai tempat penyelenggaraan administrasi kegiatan pelabuhan. Bangunan gudang digunakan untuk gudang tempat penyimpanan sementara muatan yang akan dikapalkan atau barang yang diturunkan dari kapal.

Aset yang berada di pelabuhan berdasar pada SKB Direktur Perhubungan Laut dengan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 14 Desember 1974, diatur cara-cara penyerahan pengelolaan fasilitas Pelabuhan Pekalongan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktorat Jenderal Perikanan. Adapun aset yang diserahkan adalah sbb:

No.	Jenis Aktiva	Tahun Perolehan	Ukuran M2	Ket.
1.	Tanah Pelabuhan	1826	199.770	Stbl.1930/30 jo Stbl 1926 /245
2	Pier Timar	1920	275	
3	Pier Barat	1920	200	
4	Steider	1920	51	
5	Plengsengan	1920	200	
6	Gudang / Cantor	1920	925	
7	Bangunan WC	1920	32	
8	Gudang Terbuka	1940	60	
9	Rumah Dinas Pelabuhan	1940	72	
10	Kran tangan	7 ton	
11	Rumah Makan	1940	45	
12	Los Warung	1958	60	
13	TPI	1950	325	

3. Pilihan Program Pejabat Walikota dari Orang Sipil.

Direktur Jenderal Perikanan pada tanggal 20 Agustus 1973 mengirim surat kepada Menteri

Perhubungan yang isinya pengajuan permohonan supaya status Pelabuhan Pekalongan menjadi pelabuhan khusus perikanan. Permohonan tersebut didasarkan atas perkembangan yang ada di antaranya semakin meningkatnya kegiatan usaha-usaha perikanan. Sebagian besar kegiatan yang berlangsung digunakan untuk melayani kapal-kapal perikanan, sejalan dengan itu semakin surut dan tidak berfungsinya pelabuhan dalam kegiatan niaga.

Proses formal yang berlangsung antara Departemen Pertanian dengan Departemen Perhubungan tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian peristiwa lokal di Pekalongan yang terjadi sebelumnya. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari ide untuk mengembangkan Pelabuhan Pekalongan. Meskipun dalam rancangan pembangunan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah sampai dengan tahun 1967 belum terdapat perencanaan di sektor pelabuhan dan perikanan untuk Pelabuhan Pekalongan, namun kemudian muncul pemikiran untuk menjadikan Pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan. Pemikiran tersebut secara bergayut dan berlanjut di antara orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap pelabuhan dengan memperoleh bentuk mulai dari pembahasan yang dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang dimotori Pemerintah Kotamadya Pekalongan. Langkah yang dilakukan dengan mengundang beberapa ahli untuk membahas upaya pengembangan pelabuhan perikanan melalui suatu seminar. Hasil seminar menghasilkan rumusan yang kemudian mendapat dukungan politis dari DPRD Kotamadya Pekalongan, agar dibentuk suatu tim yang diberi tugas untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya menjadikan Pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan dengan melakukan pendekatan dan lobi ke departemen terkait.

Dalam pengambilan keputusan politis tersebut, peran Walikota sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sangat menentukan. Drs. R. Soepomo sebagai walikota menggantikan walikota sebelumnya bernama R. Tegoeh Soenarjo yang memimpin Kotamadya Pekalongan dari tanggal 30 Mei 1967 sampai 11 Oktober 1972 merupakan seorang Corps Polisi Militer (CPM). Sementara itu R. Soepomo berasal dari sipil memimpin Kotamadya Pekalongan mulai 11 Oktober 1972 sampai 7 Nopember 1979, menorehkan peristiwa penting dalam tonggak sejarah Pelabuhan Pekalongan, pertama ditetapkannya Pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan khusus perikanan pada tahun 1974, dan yang kedua adalah peningkatan status pelabuhan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 1978. Pengganti R. Soepomo, Djoko Prawoto, B.A, kemudian Moch Choeron merupakan orang sipil, berbeda dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Batang, Kotamadya Tegal, Kabupaten Pekalongan dan lainnya yang pimpinannya berasal dari militer.

4. Budaya Kewirausahaan Masyarakat Pekalongan.

Menyebut Pekalongan, orang akan segera mengkaitkan dengan batik. Kecuali Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik, juga dikenal sebagai Kota Santri, dan juga sebagai Kota Perikanan. Sebagaimana pendapat Broersma, batik sebagai identitas Pekalongan sudah dikenal lama. Berdasar catatan perjalanan, pada awal abad ke 20 kota Pekalongan diwarnai dengan batik yang dibuat oleh penduduk pribumi dan Cina. Meskipun usaha batik bukan merupakan industri besar, tetapi di Hindia Belanda batik telah lama digunakan. Untuk kain dan sarung yang dihasilkan oleh pengrajin di Pekalongan dikirim ke mana-mana. Batik Pekalongan merupakan usaha kerajinan tangan yang terus berkembang. Selain bermanfaat bagi penduduk kota Pekalongan, batik juga dikenal sebagai usaha kerajinan seni yang bersahabat, dan kerajinan seni komunal yang dikuasai oleh penduduknya.

Kerajinan tenun Pekalongan merupakan kerajinan tenun tradisional, kebanyakan dimiliki

oleh haji. Pengusaha batik dan tenun merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan penting. Dalam struktur sosial, kelompok ini merupakan kelompok elite yang memegang peranan dalam sektor ekonomi. Sebagai kelompok dengan profesi pengusaha dan pedagang mereka dalam menjalankan profesinya menjalin hubungan dengan kelompok sosial yang luas dari berbagai daerah. Jalinan hubungan bisnis yang luas dan kemampuan ekonomi yang dimiliki, maka kelompok ini merupakan kelompok dalam masyarakat yang memerlukan informasi mengenai perkembangan terhadap masalah-masalah yang luas. Kegiatan dagang pada saat itu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik secara luas. Oleh karena itu dapat dipahami jika para pedagang Pekalongan berperan menjadi sponsor dari terbitkan majalah “Pelita Dagang”.

Kemudian Koperasi Persatuan Batikkerijen berkembang di Pekalongan. Lebih-lebih mulai tahun 1954, setelah koperasi diberi peran sebagai penyalur *cambrics*, perkembangannya bagaikan cendawan di musim hujan, sehingga pada tahun 1958 ketenaran koperasi Pekalongan telah menarik perhatian Bung Hatta untuk berkunjung ke Pekalongan. Perkembangan itu berlanjut sampai dengan tahun 1965 dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1965 sebagai pengganti UU No. 79 tahun 1958 yang dianggap kurang memenuhi keinginan perkembangan koperasi yang lebih cepat dan progresif. Koperasi dan pengusaha tenun pribumi memperoleh tekanan berat dengan dikeluarkannya Undang Undang Penanaman Modal Asing. Mereka tersingkir oleh kekuatan dari luar. Sebagai wirausaha jalan pasti dicari, oleh karena itu pada awal perkembangan sektor usaha perikanan banyak diminati oleh mereka-mereka yang sebelumnya bergerak di sektor tenun bergeser ke sektor penangkapan ikan di laut, dan sektor ini pada awalnya memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara cepat.

5. Pelabuhan Perikanan Pionir Pengembangan Teknologi Madya

Pengetahuan tentang cara hidup, tabiat, dan sifat tingkah laku, serta musim dari berbagai jenis ikan menjadi faktor yang mendasari penggunaan dan perkembangan berbagai jenis alat tangkap. Secara garis besar, makanan ikan yang hidupnya menggerombol adalah binatang kecil yang disebut *plankton*. Jenis ikan yang hidupnya makan *plankton* tersebut menjadi sasaran mangsa dari jenis-jenis ikan lainnya yang buas, seperti ikan *tengiri*, *talang-talang*, *tongkol* dan sebagainya. Oleh karena itu, pilihan terhadap alat tangkap yang akan digunakan disesuaikan dengan jenis ikan dan sifat-sifat ikan yang menjadi target dari kegiatan penangkapan.

Sementara itu, jenis ikan berdasarkan pada sudut pandang penangkapan sebagai usaha ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu ikan yang mempunyai arti ekonomi, dan ikan yang tidak mempunyai arti ekonomi. Ikan yang mempunyai arti ekonomi, yaitu jenis ikan yang menguntungkan untuk dijadikan sebagai obyek khusus penangkapan secara besar-besaran. Sementara ikan yang tidak mempunyai arti ekonomi adalah jenis ikan yang kalau menjadi obyek khusus untuk perusahaan ikan untuk dilakukan secara besar-besaran tidak menguntungkan. Adapun alat tangkap, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan besar, yaitu alat tangkap yang terbuat dari jurai-juraian (*nets*), alat dari tali (*lines*), alat perangkap (*traps*), dan alat tangkap lainnya (*miscellaneous*). Alat yang dikenal di Pekalonga pada tahun 1962 adalah *mayang*, *cantrang*, jaring dan pancing, kemudian tahun 1972 sudah dikenal *trawl* dan terdapat 37 buah, tiga tahun kemudian menjadi 174 buah. Banyak nelayan yang sebelumnya menggunakan *mayang* beralih ke *trawl*, karena dengan alat tangkap *trawl* yang diperoleh lebih banyak, sebab mata jaring *trawl* lebih rapat, dapat digunakan sepanjang musim dan bergerak dalam waktu siang dan malam.

Dengan Keppres No. 39 penghapusan *trawl* mulai dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1980. Akibatnya banyak tempat pendaratan ikan yang semula ramai mendadak menjadi sepi.

Hanya saja untuk Pelabuhan Perikanan Pekalongan dampak penghapusan *trawl* berlangsung tidak terlalu lama. Kegiatan penangkapan ikan segera pulih dalam beberapa bulan kemudian, dan bahkan dalam waktu kemudian menunjukkan angka pendaratan ikan di Pekalongan yang menunjukkan peningkatan. Pada awalnya kapal eks *trawl* sebagian diubah dengan *gill net*, namun dalam perkembangan kemudian *purse seine* berkembang secara cepat. Perubahan yang berlangsung secara cepat dimungkinkan sebab di Pekalongan sebelum penghapusan *trawl*, teknologi *mini purse seine* sudah mulai dikenal dan dikembangkan oleh nelayan setempat. Momen penghapusan *trawl* memberi ruang gerak yang lebih luas untuk meningkatkan dari *mini purse seine* ke *purse seine* yang dapat dikategorikan sebagai teknologi madya telah menjadi milik dari nelayan Pekalongan. Untuk itu kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Pekalongan segera dapat pulih kembali dengan pengganti *purse seine*, sementara daerah lain masih harus belajar dari nelayan di Pekalongan.

6. Keuntungan Pelabuhan Perikanan di Kotamadya Pekalongan

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 mengenai pembatasan usaha asing, memberikan keuntungan kepada Kotamadya Pekalongan. Berdasar pada ketentuan tersebut, pengusaha asing dalam melakukan kegiatannya dibatasi hanya di kota Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I), kota keresidenan, dan kota Daswati Tk. II. Kegiatan perikanan di Pelabuhan Pekalongan berada di dalam wilayah Kotamadya yang juga sebagai kota keresidenan. Bagi warga keturunan Cina, ketentuan tersebut menjadikan lokasi tempat dalam melakukan kegiatan usaha dan tempat tinggal menjadi terbatas, hanya di kota-kota, yang terendah berada di kota kabupaten/kotamadya. Pelabuhan Pekalongan ada di kotamadya, dengan demikian tetap dapat digunakan sebagai kegiatan usaha bagi warga keturunan Cina, dan terbuka sebagai tempat baru bagi mereka yang terusir dari desa-desa di sekitarnya. Akibatnya kawasan sepanjang jalan menuju ke pelabuhan yang sudah ramai semakin bertambah dengan berbagai kegiatan usaha, termasuk pengelolaan usaha bunga melati.

Sektor usaha perikanan di Pekalongan semakin berkembang dengan pindahnya para pengusaha perikanan dari Bagansiapi-api ke Pekalongan. Mulai awal tahun 1970-an, beberapa pengusaha perikanan yang pindah ke Pekalongan membawa serta kapal dan kelengkapan alat tangkapnya. Semula tujuan mereka ke Tegal yang mempunyai prasarana pelabuhan lebih baik, namun karena tidak ada dukungan keamanan dalam berusaha, akhirnya mereka pindah ke Pekalongan. Di tempat baru ini pengusaha perikanan memperoleh dukungan keamanan khususnya dari Primer Koperasi Angkatan Laut.

E. Sumber Utama, Sumber Penting dan Khusus sebagai Bahan Penulisan.

Arsip merupakan sumber utama dalam penulisan sejarah tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal yang penting diingat bahwa untuk mendapatkan arsip diperlukan ketekunan, ketelitian, dan yang teramat penting adalah kesabaran.

Adapun beberapa sumber tercetak dan majalah yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya: *Berita Perikanan*, 1949-1959; *Gemah Ripah*, 1963-1970; *Indisch Verlaag*, 1931-1937; *Kolonial Tijdschrift*, 1913, 15, 20, 26, 30, 1937; *Kolonial Studien*, 1916, 17, 21, 1940; *Mededeelingen van het Departement van Economische zaken in Nederland Indie*, 1932, 40, 1946; *Mededeelingen van het Visscherij Station te Batavia*, 1908-1912; *Jaarverslag Instituut voor de Visscherij*, 1937.

Untuk buku dan artikel penting diantaranya: Jakoep, Raden Moehamad, 1911. *Poenika*

Serat "Karti Wijasa" Anjarijosaken bab pakarjan soho pemendeting oelam seganten mawi gambar nemlikoer idji; Kampen, van, 1909. *De Hulpminddelen der Zee Visscherij op Java en Madoera in Gebruik*; Kampen, van 1922. *Visscherij en Vischtel in Nederlands Indie*; Mathew, K.S, 1990. *Studies in Maritime History*; Monopoli Gara/Het Zoutmonopolie, 1932. *Capita Selecta Perikanan Laut*, 1963; *Aisah Pergi ke Istana Dewi Lanjar*, 1995. *Atoeran-Atoeran tentang Seinendan*, 1945.

F. Sistematika Pembahasan Buku.

Buku terdiri dari tujuh bab, disusun ke dalam bagian-bagian yang mengalir menurut urutan kronologis dengan penamaan bab bab berdasar pada ciri yang menonjol pada tiap bagian. Dengan rentang waktu dari tahun 1900-1990, bahasan buku ini mencakup periode sebagai pelabuhan niaga, memasuki masa kemunduran, menjadi pelabuhan khusus perikanan, dan perkembangannya sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Setelah dikemukakan cakupan penelitian, rumusan masalah, kerangka konseptual dalam Bab Pendahuluan, dilanjutkan pembahasan Bab II, berupa lingkungan alam dan faktor dinamika kebijakan tentang pelabuhan dan perikanan. Pada bab ini dikemukakan latar belakang pemikiran bahwa keadaan alam dan kebijakan pemerintah merupakan faktor penting yang menentukan berlangsungnya kegiatan pelabuhan dan perikanan. Adapun intensitas pemanfaatan alam ditentukan oleh tingkat perkembangan teknologi, sementara itu kebijakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan ekonomis.

Pada Bab III, dibahas kegiatan perdagangan dan perikanan di Pelabuhan Pekalongan, 1900-1942, dengan menguraikan wilayah geografis keadaan perekonomian Pekalongan sebagai kota batik keterkaitannya dengan kegiatan pelabuhan niaga dan perikanan. Bab ini merupakan penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab kemunduran pelabuhan niaga Pekalongan. Kemudian juga digambarkan kegiatan perikanan di lingkungan pelabuhan tersebut yang masih dalam skala kecil.

Bab IV, membahas mengenai awal perkembangan kegiatan perikanan di Pelabuhan Pekalongan mulai tahun 1942 sampai 1974. Bahasan pada bab ini merupakan penelusuran terhadap kegiatan perikanan laut dan perdagangan di Pelabuhan Pekalongan. Kedua kegiatan tersebut mengalami kemunduran pada masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa kabinet parlementer. Namun demikian, beberapa kebijakan mendasar yang memungkinkan sektor perikanan berkembang, ditetapkan pada era kekuasaan Soekarno. Sementara itu kebijakan masa awal Orde Baru mempercepat pertumbuhan sektor perikanan di Pekalongan.

Bab V, membahas perubahan status Pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan khusus perikanan berkembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara, merupakan uraian mengenai perkembangan kegiatan perikanan sejak ditetapkannya sebagai pelabuhan khusus perikanan sampai tahun 1978, mencakup sarana fisik, supra struktur pendukung, perkembangan struktur kepengusahaan, dukungan kapital lokal, perkembangan teknologi distribusi, teknologi penangkapan dan ekspansi terhadap *fishing ground*.

. Bab VI, membahas perkembangan *purse seine*, teknologi distribusi dan pencapaian penting perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan membahas tentang perkembangan pelabuhan perikanan setelah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara sampai dengan tahun 1990. Pembahasan mengungkap pengenalan, perkembangan sampai penghapusan *trawl*, perkembangan *purse seine*, teknologi distribusi, tenaga kerja sektor perikanan, dan sumbangan sektor ini terhadap pendapatan asli daerah.

Sebagai penutup berupa simpulan dari keseluruhan bahasan, merupakan jawaban terhadap

permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan, dan sebagai epilog dari kajian utama dalam kaitannya dengan permasalahan yang lebih luas dan aktual seperti krisis ekonomi, dan otonomi daerah kaitannya dengan sektor perikanan sebagai pilar pendapatan bagi daerah yang memiliki wilayah pantai.

(Makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal, oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Makasar tgl. 26-29 Mei 2009

((Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro